

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

##### A. Pengertian Nikah

Kata nikah atau *zawa>j* yang berasal dari bahasa Arab. Apabila dilihat secara makna etimologi (bahasa) berarti “berkumpul dan menindih”, atau dengan ungkapan lain bermakna “aqad dan setubuh”. Secara terminologi (istilah) nikah atau *zawaj* adalah akad yang ditetapkan Allah Swt bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.<sup>1</sup>

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.” Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata “nikah” ( ) yang menurut bahasa artinya “mengumpulkan,” “saling memasukkan,” dan digunakan untuk arti bersetubuh (*watha'*).<sup>2</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti “penggabungan” dan “percampuran.” Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora).<sup>3</sup> Berdasarkan firman Allah Swt:

---

<sup>1</sup> Ah}mad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hal. 5.

<sup>2</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Ciputat Press, 1999), hal. 17.

<sup>3</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terj. M. Abduh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 13.

... فَأَنْكِحُوهُنَّ أَهْلَهُنَّ....

Artinya:

.... karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka....” (QS. Al-Nisa’ [4]: 25).

Definisi nikah yang lain menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

هُوَ  
أَنْ  
يُكْرِمَ

Artinya:

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Ulama Hanafi>yyah, mendefinisikan nikah dengan:

5 يُكْرِمُ

Artinya:

Nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.

Ulama Sha>fi’i>yah mendefinisikan nikah dengan:

يُكْرِمُ 6 أَهْلَهُ

Artinya:

Nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (watha’) disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi*, (Beirut: Dar al-Fikr 1418 H/ 1998 M), juz. 5, hal. 103.

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412/ 1992), juz. 2, hal. 72.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 14. Taqiyyudin Abu Bakar ibn Muhammad al-Dimasyiqi, *Kifa>yah al-Akhyar*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1404 H/ 1984 M), juz. 2 hal. 36.

Sedangkan menurut ulama Ma>likiyah, nikah adalah:

٧

Artinya:

Nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.

Adapun menurut ulama Hanabilah, nikah adalah:

8

٨

Artinya:

Nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum dianjurkannya perkawinan dalam agama Islam terdapat dalam firman Allah Swt dan hadis-hadis Nabi Muh}ammad Saw.

1. Berdasarkan firman Allah Swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika merasa miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nur [24]: 32).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>7</sup> Abdul Basi>th Mutawalli>, *Muh{a>dharah al-Fiqh al- Muqa>ran*, (Kairo: t.p, t.t), hal. 119.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 120.

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa' [4]: 3).

## 2. Berdasarkan hadis Nab Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)<sup>9</sup>

Artinya:

Hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan), dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. (HR. Muslim).

لَكِنِّ اَنَا اُصَلِّيْ وَاَتَامُ وَاَصُومُ وَاَفْطِرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي  
(رواه مسلم)<sup>10</sup>

Artinya:

Tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka dan menikah. Barangsiapa tidak menyukai perjalananku (sunnahku), maka ia bukan umatku (HR. Muslim).

<sup>9</sup> Abi Husain Muslim ibn Hujaz al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Arabi, 1425 H/ 2004 M), juz. 3, hal. 557.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 558

### C. Hukum Pernikahan

1. Mubah. Merupakan asal hukum dari perkawinan, sesuai dengan firman Allah Swt surat al-Nur [24] ayat 32. Dalam hal ini hukum nikah mungkin akan menjadi wajib, makruh ataupun haram, sesuai dengan keadaan orang yang akan kawin.<sup>11</sup>
2. Sunnah. Sekiranya seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus kepada perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah.
3. Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, maka baginya wajib menikah, sebab menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan haram hukumnya wajib.
4. Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin (impoten), maka haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang dinikahinya.
5. Makruh. Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu, maka terhadap orang ini dimakruhkan menikah, sebab walau bagaimanapun nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, baik diminta atau tidak oleh istri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 23.

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 7-10.

#### **D. Prinsip-prinsip Pernikahan**

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dituangkan ke dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang saja.
4. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat.
7. Asas pencatatan perkawinan.<sup>13</sup>

#### **E. Rukun Nikah dan Syarat Sahnya**

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7-9.

Rukun dan syarat dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena dalam setiap aktivitas ibadah di dalamnya pasti ada rukun dan syarat. Syarat itu merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan itu dilaksanakan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau dipenuhi pada saat perbuatan itu dilaksanakan, karena perkawinan merupakan suatu ibadah maka di dalamnya terdapat rukun dan syarat. Rukun-rukun nikah yaitu: [1] calon suami. [2] calon istri. [3] wali nikah. [4] dua orang saksi. [5]  $i > ja > b$  dan  $qa > bu > l$ .

Kelima rukun tersebut masing-masing harus memenuhi syarat. Syarat calon suami adalah; [1] beragama Islam. [2] terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki. [3] orangnya diketahui. [4] calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. [5] calon mempelai laki-laki kenal dengan calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya halal baginya. [6] calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan. [7] tidak sedang melakukan ihram. [8] tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri. [9] tidak sedang memiliki istri empat.<sup>14</sup>

Syarat calon mempelai wanita; [1] beragama Islam atau ahli kitab. [2] terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci). [3] wanita itu tentu orangnya. [4] halal bagi calon suami. [5] wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah. [6] Tidak dipaksa. [7] Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 50.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 56.

Sedangkan syarat-syarat wali nikah adalah; [1] laki-laki, [2] beragama Islam. [3] baligh. [4] Berakal. [5] Adil (tidak fasik). Sedangkan syarat-syarat saksi nikah adalah; [1] dua orang laki-laki. [2] beragama Islam. [3] baligh. [4] berakal. [5] dapat mendengar dan melihat (paham) akan maksud akad nikah. Syarat-syarat  $i > ja > b$   $qa > bu > l$  adalah; [1] ada  $i > ja > b$  (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali. [2] ada  $qa > bu > l$  (pernyataan) penerimaan dari calon suami. [3] memakai kata “nikah”, “*tajwiz*” atau terjemahannya seperti “kawin”. [4] antara  $i > ja > b$  dan  $qa > bu > l$  bersambungan, dan tidak boleh terputus. [5] orang yang terkait dengan  $i > ja > b$  dan  $qa > bu > l$  tidak dalam keadaan haji atau umrah. [6] majelis  $i > ja > b$  dan  $qa > bu > l$  itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>16</sup> Syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi agar perkawinan yang dilakukan tidak batal.

Saksi bertanggungjawab atas sahnya sebuah akad perkawinan, oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi. Ia harus memenuhi syarat tertentu. Dalam sebuah majelis aqad nikah, sesungguhnya semua yang hadir menyaksikan akad itu dengan mata kepala mereka kesemuanya adalah saksi nikah. Hanya saja pembahasan disini adalah yang dijadikan batas minimal saksi dan kriterianya.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 57-58.



Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi yang mutlak diperlukan untuk keabsahan akad. Adapun syarat-syarat seorang bisa menjadi saksi nikah adalah:<sup>17</sup>

### 1. Islam

Para ulama sepakat bahwa di antara syarat saksi dalam sebuah pernikahan adalah status saksi itu harus orang yang beragama Islam. Namun bila mempelai wanita yang dinikahi itu berasal dari ahlul kitab (kitabiyah), maka ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalam hal mempelai wanita ahlul kitab, Abu> Hani>fah dan Abu Yusuf adalah termasuk sebagian ulama yang membolehkan saksi nikah dari kalangan yang juga ahlul kitab. Namun Imam Sha>fi'i>, Imam Ah}mad ibn Hanbal, Muh}ammadibn al-Hasan tidak memperbolehkannya. Sedangkan bagi muallaf, maka sudah jelas status ke-Islamannya dan tidak bisa dikategorikan non Muslim. Karena itu syarat keislaman saksi dalam pernikahannya mutlak tidak bisa ditawar-tawar lagi.

### 2. Baligh (Dewasa)

Saksi nikah, keduanya harus masuk dalam kategori *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah baligh dan berakal. Anak kecil atau orang yang kurang akal (gila) tidak sah persaksiannya hal ini dikarenakan anak kecil, orang gila, orang mabuk, atau tuli mereka dianggap tidak ada dan tidak cakap hukum

---

<sup>17</sup> Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Ah}mad Ibn Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashi>d*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 119.

(mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan huku atau dimintai pertanggungjawaban hukum.

### 3. Merdeka (bukan Budak)

Ulama Sha>fi'i>yah menetapkan syarat bahwa saksi harus merdeka, demikian juga ulama Hanafi>yah yang berpendapat bahwa dua orang saksi itu harus dari orang merdeka, namun Imam Ah}mad menyatakan bahwa saksi boleh berasal dari budak karena kesaksian mereka dalam masalah lain dapat diterima, alasan lain karena dalam al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan jelas keadaan saksi itu harus merdeka.

### 4. Laki-Laki (minimal dua orang laki-laki)

Keduanya harus laki-laki, sebagaimana dinyatakan hadis riwayat Ah}mad yang menyatakan “Telah berjalan sunah dari Rasulullah SAW bahwasannya seorang wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah pidana, nikah dan thalaq.”

Sha>fi'i> dan Hanbali mensyaratkan bahwa saksi harus laki-laki. Kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak sah sebagaimana hadis riwayat Abu Ubaidah dan Zuhri yang menjelaskan bahwa Nabi Saw menyatakan perempuan tidak sah menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan thalaq. Pendapat ini menjadi pendapat Sha>fi'i>yah dan H{anabilah.



Kedua saksi tersebut harus adil dalam kacamata lahiriah. Keadilan keduanya (atau salah satunya) menjadi batal jika keduanya (atau salah satunya) diketahui tidak adil baik secara lahir maupun batin. Orang yang adil adalah seorang Muslim yang menjauhkan diri dari dosa baik yang besar maupun yang kecil, mampu menjaga kehormatan dirinya, dan terpercaya. Oleh karena itu, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil.

Dalam beberapa literatur yang lain dijelaskan bahwa kriteria adil dalam majelis akad nikah yaitu apabila seseorang tidak memperlihatkan kezhalimannya pada majelis akad yang sedang berlangsung.

طَاعَتُهُ ..... وَهُمَا يُعْرِفُ لَهُمَا :

18

Artinya:

Adil adalah orang yang ketaatannya lebih dominan dari dosa kecilnya, sampai pada pernyataan kedua saksi itu adalah orang yang tidak diketahui kefasikannya.

Secara lahiriyah, dua saksi itu boleh terdiri dari dua orang yang belum diketahui identitas adil mereka, namun hendaknya mereka disuruh untuk taubat terlebih dahulu sebelum akad dimulai dengan tujuan untuk berhati-hati dalam mengangkat saksi. Ketidakjelasan status adil atau tidaknya saksi itu akan hilang bila ada orang yang adil yang menyatakan bahwa mereka adalah fasik. Apabila kemudian saksi yang diketahui fasik tersebut melakukan taubat seketika itu juga di waktu akad dimulai, maka kesaksiannya juga hendaknya ditolak dan digantikan oleh orang lain.

---

<sup>18</sup> Syekh Nizamudin, dkk, *al-Fatwa al-Hindiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 3, hal. 354.

Imam Abu> Hani>fah menyatakan bahwa saksi nikah tidak dipersyaratkan harus adil, sehingga meskipun saksi adalah orang fasik maka tetap sah karena maksud adanya saksi nikah itu untuk diketahui umum. Sedangkan Sha>fi'i> menyatakan bahwa saksi itu harus adil, namun jika terdapat saksi yang tidak diketahui adil tidaknya sedang pada saat itu tidak dapat dijumpai orang lain, maka kesaksiannya dapat diterima dan nikahnya sah. Adilnya seseorang cukup dilihat pada saat ia berada di dalam majelis aqad nikah bila ia sedang tidak melakukan maksiat, maka ia dianggap adil pada saat itu.

6. Tidak sedang haji atau umrah
7. Tidak dipaksa
8. Dapat melihat, bicara dan mendengar serta paham atau mengerti maksud akad tersebut.

Seorang saksi dipersyaratkan dapat mendengar, dapat melihat, teliti, dapat berbicara, dan tidak memiliki cacat-cacat yang membuatnya hina. Banyak ulama yang mempersyaratkan bahwa kesaksian seorang saksi yang buta, tuli, bisu, sulit berbicara, atau pun bodoh tidak dapat diterima. Namun ulama Mazhab selain ulama Sha>fi'i>yah menyatakan bahwa boleh orang buta menjadi saksi dengan syarat ia mengenal betul suara orang yang melaksanakan akad.

9. Memahami bahasa yang digunakan untuk *i>ja>b qa>bu>l*.
10. Hadir dalam majelis dan menyaksikan *i>ja>b qa>bu>l* secara langsung.

Para saksi nikah diwajibkan mempersaksikan atas akad nikah tersebut (menyaksikan langsung akad nikah tersebut dengan mata kepala sendiri)

11. Tidak menjadi calon wali.

## F. Peran dan Kedudukan Saksi dalam Perkawinan

Mayoritas para *fuqaha*>' sepakat menyatakan bahwa kehadiran saksi dalam majlis akad nikah tidak boleh diabaikan karena saksi menjadi bagian penting dalam akad tersebut. Tiga imam mazhab, Hanafi>, Sha>fi'i>, dan Ah}mad ibn Hanbal memandang saksi sebagai unsur mutlak, saksi merupakan rukun dari akad nikah yang tidak sah akadnya bila ditinggalkan. Jika dalam majlis akad nikah tidak dihadiri dua orang saksi maka akad nikah batal. Peran penting saksi dalam keabsahan akad nikah ini oleh *fuqaha* desepakati berhubung karena mendapatkan hadis mengenai saksi nikah dalam sejumlah riwayat, meskipun dalam bunyi matan yang bervariasi.<sup>19</sup> Dipandang oleh *fuqaha*>' dari jumlah dan variasi itu, lalu satu sama lain dijadikannya sebagai *syahid al-hadis* yang saling memperkuat kedudukan nilai hadis dasar hukum yang dipegang. Matan hadis yang ditakhrij al-Sha>fi'i> riwayat dari sumber Ibnu 'Abbas sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ<sup>20</sup>

Imam Ma>lik berpendapat apabila suatu majlis akad nikah tidak dihadiri oleh seorang saksi, kemudian diberitahukan kepada khalayak ramai secara terbuka maka akad nikah itu bisa menjadi sah. Tetapi apabila suatu majelis akad nikah dihadiri saksi dan saksi itu dibebani agar tidak memberitahukan kepada siapapun

---

<sup>19</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 47.

<sup>20</sup> Muh}ammad Samsul al-Haq, *Sunan al-Daruqutni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 3, hal. 226.

maka akad nikah tersebut tidak sah. Akad nikah dalam pernikahan menurut beliau bukan wajib tetapi sunnah hukumnya.<sup>21</sup>

Rasulullah Saw sehubungan dengan akad nikah dan pengumuman ini bersabda:

اعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُذُنِ<sup>22</sup>

Artinya:

Umumkanlah akad nikah ini dan lakukanlah pengumuman itu melalui masjid, pukullah di sana rebana.

Dalam peraturan perundangan yaitu pada KUHAP Pasal 1 (26) dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Al-Qur'an sendiri tidak secara tegas menyebutkan adanya saksi dalam sebuah pernikahan sebagaimana tidak disebutkannya rukun yang lain. Dalam QS al-Thalaq dinyatakan:

.....

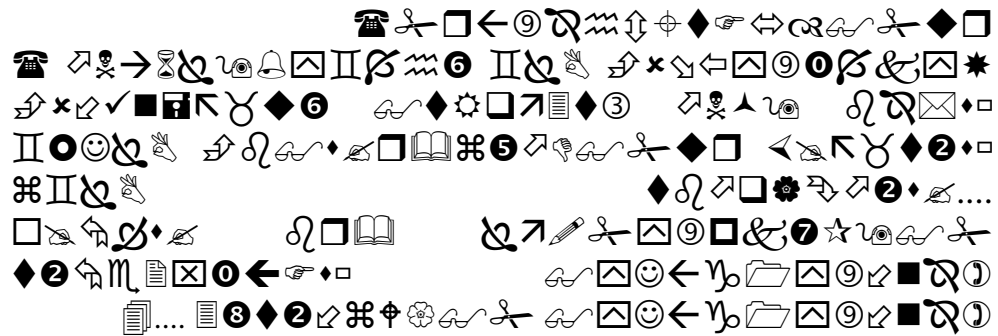
Artinya:

... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di *antara* kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.... (QS. Al-Thalaq [65]: 2).

<sup>21</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 48.

<sup>22</sup> Abi Isa Muh}ammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan At- Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1432H/ 2002M), hal. 457.

Dalam ayat lain, al-Qur'an menjelaskan fungsi penting dari hadirnya saksi dalam sebuah peristiwa muamalah.



Artinya:

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya...” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Dalam hadis dinyatakan bahwa nikah itu hanya sah bila dihadiri oleh dua orang saksi sebagaimana hadis:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَهِدَي عَدْلٍ<sup>23</sup>

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni).

Pemahaman dari hadis tersebut adalah bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan kehadiran dua orang saksi yang adil dalam menyaksikan akad nikah, maka hukum dalam menghadirkan dua orang saksi yang adil dalam akad nikah menjadi wajib. Imam Sha>fi'i> dan Imam Ah}mad ibn Hanbal bersepakat bahwa saksi itu

<sup>23</sup> Muh}ammad Samsul al-Haq, *Sunan al-Daruqutni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz 3, hal. 226



harus adil. Mereka mengatakan apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil atau tidaknya, maka pernikahan tetap sah.<sup>24</sup>

Aturan perundangan di Indonesia yang digunakan sebagai pegangan bagi rakyat Indonesia dan Petugas Pencatat Nikah berkaitan dengan saksi diantaranya dalam KMA No. 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah pada Bab IX Pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa:

“Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau P3N di luar Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

KMA No. 298 tahun 2003 Pasal 28 ayat 2 menyatakan:

“Sesaat setelah akad nikah dilaksanakan akta nikah ditandatangani oleh PPN, suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi dalam model N jika pelaksanaan akad nikah di balai nikah dan dalam model NB jika pelaksanaan akad nikah diluar balai nikah”

Masih dalam KMA No. 298 tahun 2003 Pasal 35 juga menyatakan bahwa;

(1) Saksi-saksi yang hadir pada waktu pencatatan nikah dan rujuk dipilih oleh yang bersangkutan, beragama Islam, sudah mencapai umur 19 th dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum

(2) Keluarga dekat, pegawai KUA Kecamatan atau P3N dapat diterima menjadi sebagai saksi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula aturan mengenai saksi dalam pernikahan. Keseluruhan materinya terambil dari kitab fiqih menurut jumbuh ulama, terutama fiqih Sha>fi'i>yah, sebagai berikut:

Pasal 24: “(1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, (2) Setiap pernikahan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi”.

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 101.

Pasal 25: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Pasal 26: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.

Dengan kesemua syarat tersebut dimaksudkan bahwa saksi dapat mengerti dan memahami maksud akad nikah itu.

Dalam pasal 17 (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: “Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.”

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 11 (2) telah menyatakan bahwa :

“Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya”.

Saksi dalam perkawinan adalah orang yang hadir dan menyaksikan akad perkawinan. Dalam hal ini diperlakukan kehadiran saksi karena untuk menghindari implikasi negatif dalam kehidupannya di masyarakat. Orang yang dapat menjadi saksi dalam akad perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan, yaitu; [1] berumur minimal 21 tahun. [2] berakal sehat. [3] cakap hukum (*rasyid*). [4] ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon istri.<sup>25</sup>

Jika diharuskan mengetahui lebih dahulu adil atau tidaknya seseorang saksi, maka hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu, adil bisa dilihat lahirnya saja

---

<sup>25</sup> Muh}ammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq, *Membangun Keluarga Humanis; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu*, (Jakarta: Grahacipta, 1995), hal. 31.

pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Oleh karena itu sarat adil untuk menjadi saksi dalam pernikahan cukup melihat dari segi lahirnya saja. Apabila ternyata di kemudian hari setelah terjadinya akad nikah diketahui kefasikannya, maka akad nikahnya tidak terpengaruh, dan tetap sah.<sup>26</sup>

Terdapat dalam al-Qur'an tentang kehadiran saksi mestilah mempunyai sifat yang adil. Hal ini dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al- Thalaq ayat 2:

... ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَجِدُونَ شَاهِدَيْنِ فَمَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ نِكَاحًا ثَلَاثًا﴾

Artinya:

... persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu... (QS. Al-Thalaq [56]: 2).

Berdasarkan ayat di atas disimpulkan bahwa jika tidak dapat menghadirkan saksi yang adil dalam akad nikah maka pernikahannya menjadi tidak sah, karena tidak mengikut perintah dari Allah Swt. Saksi yang adil menurut jumhur ulama adalah; [1] Beragama Islam. [2] mukallaf. [3] tidak mengerjakan dosa. [4] tidak terus menerus melakukan dosa kecil.<sup>27</sup>

Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam pernikahan, jumhur ulama yang terdiri dari ulama Sha'fi'iyah dan H{ana>bilah menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan.<sup>28</sup> Sedangkan ulama H{ana>fi>yyah dan Zha>hiriyyah

---

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Ba>ri>* , (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz.3, hal. 314.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 314-315.

<sup>28</sup> Abul Hasan 'Ali ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi, *al-H{a>wi> al-Kabi>r fi> Fiqh Madzhab al-Ima>m al-Sha>fi'i>*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 2, hal. 176. Lihat juga Abu Abdillah Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1404 H/ 1984 M), juz. 2, hal. 197.

menempatkannya sebagai syarat.<sup>29</sup> Menurut ulama Ma>likiyyah tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad nikah, yang diperlukan adalah mengumumkannya, namun diisyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum *dukhu>l* (jima') dilakukan.<sup>30</sup>

Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas adalah ulama Syi'ah Ima>miyyah. Bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad pernikahan, bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka adalah sunnah.<sup>31</sup>

Adapun hadis Nabi Saw adalah dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Tirmizi:

الْبَغَايَا الَّتِي يَنْكِحُنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيْنَةٍ

Artinya:

pelacur-pelacur itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi. (HR. Al-Tirmidzi)<sup>32</sup>

Hadis Nabi Saw dari Amran ibn Husein menurut riwayat Ah}mad, Nabi bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni).<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Syamsuddin Abu Bakar Muh}ammad al-Sarkhasi, *al-Mabsu>th*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321. Lihat juga Abu Muh}ammad Ali ibn Muh}ammad ibn Sa'id ibn Hazm, *al-Muh}alla*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 3, hal. 267.

<sup>30</sup> Ah}mad ibn Idris al-Qarafi>, *al-Furu>q*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 321. Lihat juga Abu al-Walid Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtashid*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 117.

<sup>31</sup> Abu Ja'far Muh}ammad ibn Ya'kub ibn Ishaq Kulaini Razi, *Furu>' al-Ka>fi*, (Qum: Dar al-Imam), juz. 2, hal. 81.

<sup>32</sup> Muh}ammad Abu Isa ibn Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M), juz. 2, hal. 354.

Menurut penyusun, kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami istri mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan prasangka jelek dari masyarakat.

Mazhab Ma>liki mengatakan bahwa kehadiran saksi pada akad nikah, tidak wajib (*fardhu*), tetapi cukup dengan pemberitahuan (pengumuman) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu telah berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara lain. Namun Ma>likiyah tetap menganggap perlu pemberitahuan ini sebelum suami melakukan *dukhu>l* (persetubuhan). Demikian menurut Imam Ma>lik dengan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Aisyah:

اعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ

Artinya:

Umumkanlah akad nikah ini dan lakukanlah pengumuman itu melalui Masjid, pukullah di sana rebana.<sup>34</sup>

Hadis ini menurut mazhab Ma>liki menunjukkan bahwa pemberitahuan tentang berlangsungnya akad nikah boleh dengan jalan apa saja yang antara lain

---

<sup>33</sup> Muh}ammad Samsul al-Haq, *Sunan al-Daruqutni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz 3, hal. 226.

<sup>34</sup> Abi Isa Muh}ammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1432H/ 2002M), juz. 3, hal. 457.

dengan menabuh gendang, dalam konteks saat ini yakni diadakannya resepsi pernikahan.<sup>35</sup>

Perlu diketahui adanya perbedaan jumhur dan mazhab Ma>liki dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jumhur mensyaratkan adanya saksi ketika berlangsungnya akad nikah dengan arti kata bahwa akad nikah menjadi batal tanpa kehadiran saksi.
2. Mazhab Ma>liki mensyaratkan adanya pemberitahuan ketika akan berlangsungnya persetubuhan sesudah akad. Tetapi manakala saksi atau pemberitahuan ketika berlangsungnya akad, maka hal itu sudah dipandang cukup.<sup>36</sup>

Walaupun akad nikah sama dengan akad-akad lainnya yang mensyaratkan keredhaan, *i>ja>b qa>bu>l*, akan tetapi Islam sangat memuliakan akad pernikahan. Islam menjadikan sebagian dari agama dan pengabdian diri kepada Allah Swt, oleh karena itu melakukan pernikahan dianggap sebagian ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt serta diberi ganjaran pahala. Oleh karena itu, agama Islam mewajibkan kehadiran saksi untuk menyaksikan akad nikah, karena akad nikah merupakan penyatuan antara seorang pria yang akan menjadi calon suami dengan wanita yang akan menjadi calon istri. Jika kedudukan sebagai saksi

---

<sup>35</sup> Ah}mad ibn Idris al-Qarafi, *al-Furu>q*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 327. Lihat juga Abu al-Walid Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtashid*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 121.

<sup>36</sup> Lihat *ibid*, hal. 327-328. Lihat juga *ibid*, hal. 122.

dalam akad nikah tidak terpenuhi maka akad nikah yang dilangsungkan menjadi tidak sah.

### G. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Saksi

Kesaksian terhadap akad nikah adalah perkara wajib dan merupakan syarat keabsahan nikah menurut para ulama. Di antara mereka adalah Abu> Hani>fah, Sha>fi'i>, dan Ah}mad bin Hanbal. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini hanya bila saksi satu-persatu.

Mayoritas ulama Kufah dan selainnya berpendapat bahwa nikah tidak sah sebelum dua saksi secara bersama-sama bersaksi pada akad nikah dilangsungkan. Sebagian ulama Madinah yaitu Imam Ma>lik ibn Anas meriwayatkan apabila saksi bersaksi satu persatu, maka hukumnya boleh bila mereka mengumumkan pernikahan itu.

Dalam Kitab *Bida>yah al-Mujtahi>d* disebutkan bahwa Imam Abu> Hani>fah, Sha>fi'i> dan Ma>lik sependapat bahwa persaksian termasuk syarat bagi nikah hanya mereka berselisih pendapat apakah menjadi syarat sahnya nikah atau menjadi syarat *tamam* (kesempurnaan) nikah. Dalam hal ini pendapat mereka adalah:

Pertama, Imam Ma>lik dan Imam Sha>fi'i> berpendapat bahwa saksi nikah itu termasuk ketentuan syara', oleh karena itu saksi merupakan syarat sahnya nikah yang harus ada pada waktu berlangsungnya akad nikah.<sup>37</sup> Kedua, Abu>

---

<sup>37</sup> Selengkapnya lihat *ibid*, hal. 328-329. Lihat juga *ibid*, hal. 123. Lihat juga Muhyiddi>n Abi> Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawa>wi>, *al-Majmu>' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 128.

Hani>fah berpendapat bahwa saksi nikah itu diadakan dengan maksud untuk menghindarkan perselisihan dan pengingkaran. Karena itu saksi hanya termasuk *tama>m* (kesempurnaan) dengan membawa tujuan *i'la>n*, yakni pemberitahuan akan terjadinya nikah. Oleh sebab itu saksi boleh terdiri dari dua orang fasik.<sup>38</sup>

Ketiga, menurut Sha>fi'i> bahwa saksi nikah itu mempunyai dua maksud yaitu maksud *i'la>n* dan maksud *syara'*. Oleh karenanya, saksi nikah harus dari orang yang adil dan tidak sah bila dari orang yang fasik. Imam Sha>fi'i> sendiri memasukkan dua orang saksi (*sya>hidain*) itu sebagai syarat nikah, bukan sebagai rukun nikah.<sup>39</sup> Keempat, Abu Sufya>n al-Tsauri berpendapat bahwa saksi itu tidak termasuk syarat nikah, sama juga syarat sah atau syarat *tama>m* nikah. Mereka menyandarkan argumennya berdasarkan *atsar* bahwa Hasan ibn Ali pernah nikah tanpa saksi walaupun kemudian pernikahan tersebut diumumkan.<sup>40</sup>

Kelima, sedangkan Abu> Hani>fah dan Sha>fi'i> berpendapat bahwa nikah yang sudah ada dua orang saksi adalah tidak nikah *sirri*, maka tidak di-*fasakh* sekalipun berpesan dengan sembunyi (*kitma>n*).<sup>41</sup> Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian

---

<sup>38</sup> Selengkapnya lihat Syamsuddin Abu Bakar Muh}ammad al-Sarkhasi, *al-Mabsu>th*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322.

<sup>39</sup> Muhyiddi>n Abi> Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawa>wi>, *al-Majmu>' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 128-129.

<sup>40</sup> Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Ah}mad Ibn Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashi>d*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 206

<sup>41</sup> Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Ah}mad Ibn Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashi>d*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 206. Selengkapnya lihat Selengkapnya lihat Syamsuddin Abu Bakar Muh}ammad al-Sarkhasi, *al-Mabsu>th*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 322. Muhyiddi>n Abi> Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawa>wi>, *al-Majmu>' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 129.



dalam perkawinan hukumnya adalah *istislah*, dianjurkan, dan bukan merupakan kewajiban.<sup>42</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa persaksian tidak mengandung *illa*, ketika dua orang saksi itu berpesan untuk menyembunyikan akad nikah, merahasiakan dan tidak memberitahukan kepada khalayak ramai maka perkawinannya tetap sah namun dianggap *sirri* dan harus di-*fasakh*.<sup>43</sup> Lebih lanjut argumentasi Imam Malik didasarkan pada kualitas hadis yang mengemukakan tentang saksi dalam perkawinan, di antaranya adalah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ<sup>44</sup>

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni)

Ibnu Munzir berpendapat bahwa tidak satupun hadis shahih tentang syarat dua orang saksi dalam pernikahan.<sup>45</sup> Yazid ibn Harun berkata bahwa Allah Swt memerintahkan menggandakan saksi dalam urusan jual beli, bukan dalam pernikahan, akan tetapi golongan rasionalis (pemakai dasar qiyas) mensyaratkan adanya saksi dalam pernikahan dan mereka tidak mensyaratkan dalam jual beli. Jika telah terjadi akad nikah, tetapi dirahasiakan dan mereka memesankan kepada

<sup>42</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Ya'qub ibn Ishaq Kulaini Razi, *Furu' al-Kafi*, (Qum: Dar al-Imam), juz. 2, hal. 81.

<sup>43</sup> Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 328. Lihat juga Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 123.

<sup>44</sup> Muhammad Samsul al-Haq, *Sunan al-Daruqutni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz 3, hal. 226.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Darl Farth, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 542.

orang yang hadir agar merahasiakan pula, maka pernikahannya sah, tetapi makruh karena menyalahi perintah syaria't agar mengumumkan pernikahan.<sup>46</sup>

Ma>lik dari Abi Zubair mengatakan:

هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ<sup>47</sup>

Artinya:

Bahwa dibawa kepada Umar pernikahan yang tidak disaksikan pada perkawinan tersebut. Maka Umar berkata: Ini perkawinan rahasia. Saya tidak memperbolehkannya. Jika engkau telah bersetubuh pada perkawinan tersebut, niscaya saya rajam.<sup>48</sup>

Ibnu Taimiyyah menentang persyaratan adanya saksi saja (tanpa ada pengumuman) adalah lemah, tidak berdasarkan kitab ataupun sunnah, karena tidak ada satu hadis pun dari Nabi Saw yang menjelaskan hal itu. Diantara sesuatu yang tidak mungkin adalah bahwa rasulullaash Saw tidak menjelaskan syarat-syarat suatu perkara yang boleh dilakukan oleh kaum Muslimin, padahal ini termasuk sesuatu yang sangat sering dilakukan oleh banyak orang.<sup>49</sup>

Kedudukan hadis tersebut menurut informasi al-Tirmidzi> dan dikeluarkan oleh al-Da>ruquthni dan al-Baihaqi adalah hadis *h}asan*, karena dalam *sanad*-nya ada perawi yang dikategorikan *matru>k* yaitu Abdulla>h ibn Mahru>z. Demikian juga Ma>lik menilai hadis tersebut sebagai hadis *munqathi'*. Imam Ma>lik dan ulama hadis lainnya dalam meneliti hadis yang mengungkapkan bahwa adanya

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 544.

<sup>47</sup> Malik ibn Anas, *al-Muwaththa>*, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, 535.

<sup>48</sup> Muh}ammad ibn Idris al-Sha>fi'i>, *al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), juz. 2, hal. 176.

<sup>49</sup> Abu al-Abbas Taqiuddin Ahmad ibn Abdus Salam ibn Abdullah al-Harrani ibn Taimiyyah, *Majmu>' Fata>wa> ibn Taimiyyah*, (Kairo: Dar al-Wafa' 1401 H/ 1981 M), juz. 3, hal. 279.

saksi dalam perkawinan menggunakan pendekatan kebahasaan. Mereka berpendapat bahwa saksi itu bukan syarat sah, karena kalimat *nafiy* “*la nika>ha*” dalam hadis di atas menunjukkan makna kesempurnaan (*li al-tama>m*) bukan keabsahan (*li al-shihhah*). Karena itu Imam Ma>lik dan ulama hadis lain, mengatakan bahwa hadis yang mengemukakan adanya saksi dalam perkawinan semuanya adalah *dha>'if*, oleh karenanya Ma>lik berpendapat bahwa dalil tentang imperatif adanya saksi dalam perkawinan bukan merupakan dalil *qath'i*, tapi hanya dimaksudkan *sadd al-dzari>'ah*. Menurutny saksi tidak wajib dalam akad nikah, tetapi perkawinan tersebut harus di-*i'lan*-kan sebelum *dukhu>l* dan saksi bukanlah syarat sah suatu perkawinan.<sup>50</sup>

Sedangkan dalam prakteknya di masyarakat Indonesia, kawin *sirri* adalah perkawinan yang tidak disaksikan oleh orang banyak dan tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dicatat di KUA. Padahal mencatatkan perkawinan sangat penting, terutama untuk mendapatkan hak-hak ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan itu sendiri.

Bila ada yang menyebut Islam tak mengatur pencatatan untuk perkawinan, hal itu tak benar. Harus dipahami pula bahwa perhatian Islam sangat besar. Bahkan pada pencatatan setiap transaksi hutang dan jual beli pun dilakukan. Apa lagi menyangkut soal perkawinan. Bila untuk urusan muamalah, seperti hutang saja pencatatan dilakukan, apalagi untuk urusan terpenting perkawinan. Alasannya, perkawinan akan melahirkan hukum-hukum lain, seperti hubungan pengasuhan anak dan hak waris.

---

<sup>50</sup> Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Ah}mad Ibn Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtashi>d*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 208.

Namun ironisnya, di dalam masyarakat kini, walaupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diberlakukan, praktik perkawinan sirri yang melanggar Undang-undang ini terus saja berlangsung. Bahkan ada kecenderungan dalam masyarakat Islam, kawin siri dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama. Dalam perkembangannya, kawin *sirri* dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama.

Dalam pandangan Islam, perkawinan *sirri* dilaksanakan sekedar untuk memenuhi ketentuan mutlak sebagai sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali pengantin perempuan, dua orang saksi, *i>ja>b* dan *qa>bu>l*. Keempat hal tersebut merupakan syarat sebagai rukun atau syarat wajib nikah. Umumnya, dalam sebuah perkawinan yang lazim, selain itu juga terdapat sunnah nikah yang perlu dilakukan, di antaranya khutbah nikah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimah, menyebutkan mahar atau mas kawin. Jika demikian, maka dalam proses kawin *sirri* yang dilaksanakan adalah rukun atau wajib nikahnya saja. Sementara sunnah nikah tak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang disebut *walimah*. Dengan demikian orang yang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja. Keadaan demikian disebut dengan sunyi atau rahasia atau *sirri*.

Perkawinan yang tanpa dicatatkan oleh PPN maka menurut syariat tetap sah karena pencatatan tersebut hanyalah syarat administratif saja sehingga menurut negara mempunyai hukum yang kuat, karena standar sah ditentukan oleh norma

agama, namun tentu saja pernikahan tersebut mempunyai efek negatif terutama mengenai kepastian dan kekuatan hukum pernikahan itu sendiri.

Dari penjelasan diatas, kiranya dimasukkannya dua orang saksi menjadi rukun nikah oleh ulama itu bertujuan untuk memperkuat status pernikahan dan status seseorang supaya jangan diabaikan. Pendapat inilah yang banyak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia yang sudah berjalan lama dan pengawasan pelaksanaannya di Indonesia dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Tatkala produk hukum negara dilahirkan melalui ijtihad ulama dan untuk kemaslahatan rakyat, maka produk itu menjadi produk syariat juga. Adanya kaidah yang menyatakan: “keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perselisihan” serta kaidah “keputusan pemerintah terhadap rakyatnya ditetapkan untuk kemaslahatan“.

## H. Hikmah Perkawinan

Sungguh amat jelas dibalik segala sesuatu pasti ada hikmahnya, dalam perkawinan misalnya, hikmah yang paling mudah terlihat ialah bahwa perkawinan yang terjadi pada makhluk hidup baik tumbuhan, binatang, manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan. Karena jika perkawinan tidak terjadi pada makhluk hidup, maka dapat dipastikan bahwa keberlangsungan kehidupan di dunia ini tidak akan berlangsung lama dan hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas ataupun generasi yang selanjutnya. Oleh karenanya, Allah Swt menjadikan Adam khalifah di muka bumi ini, sehingga anak-anaknya dapat berkembang biak meramaikan dan memakmurkan bumi yang luas ini.

Al-Qur'an mengisyaratkan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu, dan dari padanya Allah Swt menciptakan isterinya, dan daripada keduanya dijadikan berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa' [4]: 1).

Hikmah lain yang dapat diambil dari sebuah pernikahan adalah bahwa pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

Dengan adanya pernikahan naluri kebatinan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan tumbuh perasaan nyaman, cinta dan kasih sayang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang, menyadari tanggung jawab beristri, dan menanggung jawab anak-anak dalam mencari nafkah demi keluarga yang tengah dipimpinnya. Semangat bekerja akan tumbuh karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya.

### **I. Hikmah Adanya Saksi Nikah dalam Pernikahan**

Perkawinan adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat oleh manusia, walaupun begitu akad nikah bukanlah suatu perjanjian kebendaan bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan. Dengan demikian, hikmah atau filosofi wajib adanya saksi dalam pernikahan di antaranya adalah;

1. Saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai alat bukti apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut. Juga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak. Bahkan dalam pengertian akad nikah, keberadaan saksi juga disebutkan bahwa akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>51</sup>
2. Saksi nikah selain merupakan rukun nikah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke

---

<sup>51</sup> Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322.

pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Sehingga selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung *i>ja>b qa>bu>l* tersebut, ia juga dimintai tanda tangannya dalam akta nikah pada waktu dan di tempat *i>ja>b qa>bu>l* tersebut diselenggarakan.<sup>52</sup>

3. Menurut Abu> Hani>fah adalah informasi (*i'lan>*) telah dilangsungkannya sebuah akad nikah.<sup>53</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud:

اعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ<sup>54</sup>

Artinya:

Umumkanlah akad nikah ini dan lakukanlah pengumuman itu melalui Masjid, pukullah di sana rebana. (HR Abu Daud).

4. Untuk memperkuat ikatan pernikahan dan keturunannya.
5. Penghormatan terhadap sunnah Nabi.
6. Penghormatan terhadap kedua mempelai.
7. Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan, sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Logikanya, sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta-kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak perlu

---

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, ( Jakarta: Grafindo Persada, 1997 ), hal. 145.

<sup>53</sup> Syamsuddin Abu Bakar Muh}ammad al-Sarkhasi, *al-Mabsu>th*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322.

<sup>54</sup> Abi Isa Muh}ammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1432H/ 2002M), juz. 3, hal. 457.



disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, disunatkan mengadakan resepsi perkawinan (*walimah al-‘ursy*).<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, ( Jakarta: Grafindo Persada, 1997 ), hal. 145.